



ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA BAGI HASIL PAJAK, *FLYPAPER EFFECT* TERHADAP KAPASITAS FISKAL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nabila Ramadhaniar Sumantri^a, Lu'lu'ul Jannah^b

^aBisnis dan Pendidikan / Akuntansi, nabila.ramadhaniar@mncu.ac.id, Universitas Media Nusantara Citra

^bBisnis dan Pendidikan / Akuntansi, luluul.jannah@mncu.ac.id, Universitas Media Nusantara Citra

ABSTRACT

Increasing local government PAD needs to pay attention to posts that are the main regional revenues. This is to increase Fiscal Capacity in realizing regional independence. This study aims to determine the effect of Regional Tax (PD), Regional Retribution (RD), Revenue Sharing Tax Revenue (DBHP) and Flypaper effect (FE) on Fiscal Capacity (KF). This study uses quantitative analysis techniques, and the population of this study is the Special Region of Yogyakarta while the sampling technique chosen is purposive sampling with a research sample of 5 districts/cities in the province of DIY. The data that has been collected was analyzed using data analysis which first tested the classical assumptions before testing the hypothesis. Hypothesis testing in this study using multiple regression analysis with t test, f test, and the coefficient of determination. The results of this study indicate that Local Tax (PD) has a significant negative effect, Regional Retribution (RD) has a significant positive effect, and the Flypaper effect (FE) has a significant negative effect on Fiscal Capacity (KF). Meanwhile, the Tax Revenue Sharing Fund (DBHP) has no significant effect on Fiscal Capacity (KF).

Keywords: *Regional Taxes, Regional Levies, Tax Revenue Sharing Funds, Flypaper effect, Fiscal Capacity*

ABSTRAK

Peningkatan PAD pemerintah daerah perlu memperhatikan pos-pos yang menjadi penerimaan utama daerah. Hal ini guna meningkatkan Kapasitas Fiskal dalam mewujudkan kemandirian daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dan *Flypaper effect* (FE) pada Kapasitas Fiskal (KF). Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif, dan populasi penelitian ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta sementara teknik sampling yang dipilih yaitu purposive sampling dengan sampel penelitian sebanyak 5 Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan data analisis yang terlebih dahulu menguji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan uji t, uji f, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah (PD) berpengaruh signifikan negatif terhadap Kapasitas Fiskal (KF), Retribusi Daerah (RD) berpengaruh signifikan positif, dan *Flypaper effect* (FE) berpengaruh signifikan negatif terhadap Kapasitas Fiskal (KF). Sementara Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal (KF).

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, *Flypaper effect*, Kapasitas Fiskal

PENDAHULUAN

Sistem pengurusan lembaga Indonesia di era sekarang sudah menganut asas desentralisasi tepatnya sejak 1 Januari 2001, otonomi daerah dalam bentuk wewenang didelegasikan pada semua daerah Indonesia baik provinsi, juga kabupaten/kota. Menteri Keuangan Republik Indonesia (No.37/PMK.07/2016) tentang Peta Kapasitas Fiskal, kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan suatu daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kapasitas fiskal di suatu daerah menjadi sangat penting karena pemerintah daerah dapat menjadikan kapasitas fiskal sebagai patokan untuk mengevaluasi kemampuan keuangan di daerahnya. Kapasitas fiskal yang didominasi oleh potensi PAD dari pajak dan retribusi daerah dan dibantu dengan dana perimbangan namun, tingkat kapasitas fiskal antar provinsi maupun kota/kabupaten masih mengalami kesenjangan secara signifikan. Hal ini mengakibatkan terhalangnya kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah, memenuhi pelayanan publik dan mendukung kesinambungan fiskal nasional.

Pajak daerah sebagai bagian dari PAD, adalah pajak yang diberikan dari pemerintah daerah terhadap penduduk yang tinggal di wilayah hukumnya tanpa langsung menerima kompensasi dari pemerintah daerah. Berbagai jenis pajak daerah dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat memungkinkan apabila pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam menetapkan sendiri berbagai jenis pajak daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (Asih & Irawan, 2018). Di DIY sendiri pajak daerahnya antara lain yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, rokok, bermotor, PBB dan sebagainya. Semakin tinggi potensi dan kontribusi pajak daerah maka semakin besar pula untuk memenuhi belanja daerah yang akhirnya mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam keuangannya yang ditunjukkan dengan kapasitas fiskal.

Retribusi daerah merupakan komponen lain yang juga termasuk dalam PAD, sebagai penerimaan pemerintah daerah atas pemberian pelayanan tertentu penduduk yang tinggal di wilayah hukumnya. Retribusi daerah di DIY sendiri seperti retribusi jasa umum yaitu pelayanan kesehatan, persampahan, pemakaman, pasar dan lain-lain, kemudian retribusi jasa usaha yaitu terminal, tempat pelelangan, tempat rekreasi dan olahraga, tempat khusus parker dan sebagainya, selanjutnya retribusi perizinan tertentu yaitu izin mendirikan bangunan, gangguan, trayek dan sebagainya. Menurut Asih & Irawan (2018) perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut Asih & Irawan (2018) Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut.

Selain potensi PAD, dalam menyeimbangkan kapasitas fiskal juga dibantu dengan adanya

transfer salah satu dana perimbangan yang ditransfer yaitu Dana Bagi Hasil (DBH). DBH sendiri dibagi menjadi dua yaitu DBH Pajak dan Sumber Daya Alam. Dana tersebut akan ditransfer oleh pusat kepada daerah yang memiliki kekayaan alam dan penghasilan pajak (Yuliana; Adi Wijaya; Mauliadi, 2021). Sumber pendapatan disuatu daerah sangat perlu diperhatikan karena sumber inilah yang dijadikan sebagai penunjang pembangunan daerah dan sebagai bentuk kontribusi langsung dari masyarakat. Jika struktur PAD sudah kuat, maka suatu daerah dinilai memiliki kemampuan pengelolaan yang juga kuat dan transfer dari pusat hanya sebagai penyokong bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah (Kurniasih et al., 2011). Namun, hal ini akan berbanding terbalik jika semua pengeluaran daerah menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat maka kebijakan fiskal akan rusak dan setiap pengeluaran akan mengakibatkan keputusan negosiasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Ering et al., 2017). Masih banyak pemerintah daerah yang bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat daripada menggali sumber pendapatan daerahnya sendiri sebagaimana visi dan misi dari desentralisasi. Fenomena yang terjadi dewasa ini pemerintah daerah makin bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat (Ayudhya, 2015). Berdasarkan keadaan ini juga sering disebut sebagai fenomena *Flypaper effect* yaitu belanja pemerintah daerah lebih banyak bersumber dari dana transfer tidak bersyarat (DAU dan DBH) daripada bersumber dari PAD.

Kemudian sehubungan dengan hal tersebut maka dapat diprediksi bahwa adanya pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, dengan Kapasitas Fiskal. Sementara untuk alokasi sumber dana juga harus terbebas dari adanya pengaruh *Flypaper effect* dalam DAU ataupun DBH. Adapun sudut pandang dan kontribusi penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah, masyarakat dan penulis sebagai dasar untuk mengetahui perkembangan pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil pajak, *Flypaper effect*, dan kapasitas fiskal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pemberian solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis keterkaitan tersebut dengan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitiannya. Judul penelitian yaitu Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Kapasitas Fiskal Serta Analisis *Flypaper effect* Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

LANDASAN TEORI

Teori Desentralisasi Fiskal

Menurut Bahl (1999) desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak (taxing power). Secara teori dengan kemampuan pajak maka suatu pemerintah daerah dapat memiliki sumber untuk dana pembangunan yang besar. Teori ini memiliki prinsip yaitu pemerintah mampu sejalan dengan berbagai perkembangan dan kebutuhan rakyat hingga saat ini, seperti dalam perpajakan dan otonomi daerah.

Teori Kemanfaatan (*Utility*)

Teori kemanfaatan yang disempurnakan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1960-an yang mengatakan bahwa tujuan hukum harus berguna bagi individu masyarakat dan mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya (Fios, 2012). Sehingga teori kemanfaatan ini mengartikan perwujudan kesejahteraan rakyat agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan keadaan dan kebutuhan rakyat.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009). Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah yang mempengaruhi keuangan dalam belanja modal (Intani, 2018). Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diartikan bahwa pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting yang pungutannya sesuai dengan undang-undang dan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan (UU No. 28 Tahun 2009). Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang diperoleh dari pihak yang membayar retribusi daerah untuk mendapatkan jasa atau imbalan secara langsung yang pelaksanaannya didasari sesuai peraturan yang berlaku (Intani, 2018). Dengan demikian definisi dari retribusi daerah merupakan pemungutan daerah kepada pihak pribadi atau badan dengan imbalan yang bersifat langsung berupa jasa ataupun layanan.

Dana Bagi Hasil Pajak

Definisi Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dalam mendanai kebutuhan daerah mewujudkan pelaksanaan desentralisasi (Darwin Marasi Purba, Yansen Siahaan, 2020). Sehingga definisi DBH Pajak adalah dana bagi hasil yang diperoleh dari pajak yang dipungut dan dibagi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kapasitas Fiskal

Menurut Ayudhya (2015) pengertian kapasitas fiskal adalah sejumlah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara atau daerah. Kapasitas pula dapat dikatakan sebagai potensi penerimaan. Menurut Lisnawati (2018) kapasitas fiskal dijadikan patokan untuk melihat seberapa besar potensi ekonomi yang bisa digali dan dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah. Penghitungan kapasitas

fiskal ini dilakukan berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun sebelumnya yang telah sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah (Anggi Aulia Rahma, 2018).

Flypaper effect

Flypaper effect merupakan respon pemerintah daerah yang asimetris terhadap perubahan penggunaan transfer (Aisyah Najibah Nabilah Aris Soelistyo Hendra Kusuma, 2016). Lebih jelasnya yang dimaksud asimetris ketika belanja daerah lebih besar bersumber dari dana transfer pusat daripada PAD itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif atau perhitungan ilmiah untuk mengukur suatu hubungan terhadap bagian-bagian dan fenomena. Konjungtif kuantitatif, yaitu penelitian yang mempertanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013:57). Lebih lanjut menurut Sugiyono (2013:8) metode kuantitatif sendiri didasarkan pada filsafat positifisme, menggunakan populasi atau sampel tertentu untuk mengumpulkan data, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik yang diperuntukan menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan desain korelasi atau hubungan antara variabel bebas X_1 , X_2 , X_3 , X_4 terhadap variabel terikat Y . Sehingga penelitian akan mengukur suatu hubungan tentang variable bebas Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), Dana Bagi Hasil Pajak (X_3), *Flypaper effect* (X_4), dan Kapasitas Fiskal (Y) kabupaten/kota di DIY secara khusus selama periode 2019-2021.

Dengan hipotesis yang sudah ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pajak daerah memiliki pengaruh terhadap kapasitas fiskal di provinsi DIY.

H2: Retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap kapasitas fiskal di provinsi DIY.

H3: Dana bagi hasil pajak memiliki pengaruh terhadap kapasitas fiskal di provinsi DIY.

H4: *Flypaper effect* memiliki pengaruh terhadap kapasitas fiskal di provinsi DIY.

Analisis Deskriptif

Pada analisis ini akan melihat kondisi penerimaan di daerah DIY. Kemudian yang mana deskripsi tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik data mengenai minimal, maksimal, mean, median dari data yang diteliti.

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Danang Sunyoto (2013:47) analisis regresi adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan perangkat komputer SPSS.

Uji Statistik F (Simultan)

Menurut P.Duwi (2012:137) Uji F adalah:

“Uji F atau uji koefisien regresi digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.”

Uji Koefisien Determinasi

Tes ini menunjukkan seberapa baik model pada variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen secara bersamaan (Prasetyo & Ngumar, 2017). Nilai koefisien determinasi / R² berada pada rentang angka nol (0) dan satu (1).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel Statistik Deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	Median	Std. Deviation	N
X1	.01	.26	.0752	.0508	.08121	15
X2	.00	.02	.0070	.0055	.00662	15
X3	.00	.91	.1528	.0107	.30484	15
X4	-.07	.07	.0180	.0200	.05265	15
Y	5.71	11.54	8.9173	9.8337	2.59293	15

Sumber: Data SPSS

Tabel di atas berisi mengenai nilai minimal, maksimal, mean, median, dan Std. Deviation untuk setiap variabel dari banyaknya data yang diteliti selama tahun 2019 sampai tahun 2021.

Analisis Regresi Berganda

Tabel Uji Regresi Berganda

Coefficients^a			
Model		Unstandardized Coefficients	Sig.
		B	
1	(Constant)	9.505	.000
	x1	-17.706	.010

	x2	269.648	.005
	x3	-1.649	.341
	x4	-49.976	.000
a. Dependent Variable: y			

Sumber: Data SPSS

Hasil persamaan dari Tabel

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 9,505 + -17,70 X_1 + 269,64 X_2 + -1,64 X_3 + -49,97 X_4 + e$$

Nilai konstanta sebesar 9,505 nilai ini menunjukkan bahwa ketika variabel dependen Kapasitas Fiskal adalah nol maka Kapasitas Finansial yaitu sebesar konstan 9,505%.

Uji Statistik F

Hasil pengolahan data SPSS dengan uji-F untuk melihat apakah ada pengaruh gabungan dari variabel bebas terhadap variabel terikat dan untuk menguji apakah model yang digunakan adalah tetap.

Tabel Uji Simultan

ANOVA^a
Sig.
.000^b

Sumber: Data SPSS

Hasil pengolahan data pada tabel di atas mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (sig 0,000 < 0,05). Hal ini menyatakan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel Y.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel Uji Koefisien Determinasi

Model Summary
R Square
.875

Sumber: Data SPSS

Koefisien determinasi dimaksudkan untuk melihat atau mengukur seberapa dekat model dalam menjelaskan variabel terikat. Dari output SPSS pada tabel 4.12 di atas, besarnya R-square

adalah 0,875, kontribusi variabel X1, X2, X3, dan X4 adalah 87,5%, dan sisanya 12,5% (100-87,5%) ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak dikenali dalam penelitian ini.

Hasil Pengujian Hipotesis dengan Uji t

Dengan jumlah data 15 dan tingkat signifikansi 5% pengambilan keputusan menolak atau menerima hipotesis menggunakan rumus t tabel = $t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,05/2; 15-4-1) = (0,025; 10)$ maka terpilih untuk data 10 adalah **2,2281** berdasarkan kriteria sebagai berikut.

- a. Variabel Pajak daerah (X1) berpengaruh terhadap Kapasitas fiskal (Y), karena t-hitung > t-table (-3,178 > 2,2281) dan signifikansi sebesar $0,010 < 0,05$. Artinya variabel Retribusi Daerah mempengaruhi Kapasitas Fiskal dalam penelitian ini. Pajak daerah yang dihasilkan dari persamaan regresi mempengaruhi kapasitas fiskal. Menaikkan pajak daerah sebesar satu digit mengurangi kapasitas fiskal sebesar -17.706. Artinya kenaikan atau penurunan nilai realisasi pajak daerah mempengaruhi pendapatan serta kebutuhan fiskal.

H1: Pajak daerah memiliki pengaruh terhadap kapasitas fiskal di provinsi DIY. Ha diterima.

- b. Variabel Retribusi Daerah (X2) berpengaruh terhadap Kapasitas fiskal (Y), karena t-hitung > t-table (3,605 > 2,2281) dan signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$. Artinya variabel retribusi daerah mempengaruhi Kapasitas Fiskal dalam penelitian ini. Retribusi daerah dari hasil persamaan regresi mempengaruhi kapasitas fiskal. Apabila retribusi daerah bertambah dalam satu satuan angka mengakibatkan peningkatan pada kapasitas fiskal sebesar 269.648.

H2: Retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap kapasitas fiskal di provinsi DIY. Ha diterima.

- c. Variabel Bagi Hasil Pajak (X3) tidak berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal (Y) karena t-hitung < t-tabel ($-0,999 < 2,2281$) dan signifikansi $0,341 > 0,05$. Artinya variabel Dana Bagi Hasil Pajak tidak mempengaruhi Kapasitas Fiskal dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini selama kurun waktu tiga tahun terakhir dengan berbagai

kondisi yaitu normal, pandemi, dan pemulihan ekonomi makan dana bagi hasil pajak (DBHP) tidak mempengaruhi kapasitas fiskal Di Yogyakarta.

H3: Dana bagi hasil pajak memiliki pengaruh terhadap kapasitas fiskal di provinsi DIY. Ha ditolak.

- d. Variabel *Flypaper effect* (X4) berpengaruh terhadap Kapasitas fiskal (Y), karena $t\text{-hitung} > t\text{-table}$ ($-5,992 > 2,2281$) dan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya variabel *Flypaper effect* mempengaruhi Kapasitas Fiskal dalam penelitian ini. Hasil penelitian dari persamaan regresi variabel *Flypaper effect* terhadap kapasitas fiskal menunjukkan angka -49.976 . Hal ini berarti jika *Flypaper effect* meningkat maka kapasitas fiskal di Kabupaten atau Kota di Yogyakarta akan mengalami penurunan.

H4: *Flypaper effect* memiliki pengaruh terhadap kapasitas fiskal di provinsi DIY. . Ha diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil uji dari variabel Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Hasil uji dari variabel Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Hasil uji dari variabel Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Hasil uji dari variabel *Flypaper effect* berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saran

1. Pemerintah daerah dapat meningkatkan sumbangan retribusi daerah dengan memperhatikan setiap pungutan serta terus menggali potensi yang dimiliki daerah. Dengan demikian realisasi yang diperoleh mampu mencapai target yang diharapkan. Pemungutan retribusi perlu dilakukan secara transparan tujuannya untuk memperjelas berapa besar beban retribusi yang dikeluarkan oleh masyarakat.
2. Pemerintah daerah dapat menambahkan jenis retribusi sesuai dengan aturan. Tidak menjadi irasional dalam menciptakan berbagai retribusi daerah. Sebab banyak daerah yang menciptakan retribusi daerah malah terus memberati masyarakat dan bersifat inkompatibel dari investasi.
3. Pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat.

4. Menyusun dan menargetkan anggaran sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan program pembangunan yang ekonomis dan produktif sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas, dan memberikan dampak investasi bagi pemerintah dan masyarakat. Seperti meningkatkan sektor dalam bidang pertanian dan pariwisata, ataupun dalam bidang jasa dan ditunjang dengan infrastruktur yang memadai.
5. Pemerintah daerah dapat mempermudah perizinan usaha, menetapkan jaminan untuk kepastian hukum serta keamanan, kebijakan pemerintah daerah yang transparan, penciptaan kondisi persaingan usaha yang sehat.
6. Pemerintah dapat membangun dan menciptakan daerah yang lebih mandiri karena apabila suatu daerah tersebut mampu mandiri dan mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat maka dapat dijadikan contoh oleh daerah lain. Sehingga jika masing-masing daerah mengikuti langkah kemandirian tersebut maka seluruh daerah di Indonesia akan menjadi daerah yang maju dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju.

Saran selanjutnya ditunjukkan kepada peneliti berikutnya dapat menentukan variabel lain baik semacam tingkat kemiskinan, PAD, dan DAU dalam kaitanya terhadap tingkat kapasitas fiskal. Serta penambahan objek penelitian untuk beberapa provinsi atau bahkan di seluruh Indonesia untuk menguji dan mengetahui pertumbuhan kapasitas fiskal berdasarkan ekonomi di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N., & Aris, S. (2016). *Analisis Flypaper effect PAD Dan DAU Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014*. July, 1–23.
- Anggi, A. (2018). Analisis *Flypaper effect* Berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal (Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4871>.
- Asih, S., & Irawan. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 177–191.
- Ayudhya, H. (2015). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Kapasitas Fiskal Di Jawa Timur. *Repositry Universitas Jember*. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/82801>.
- Bahl, R. (1999). Implementation Rules For Fiscal Decentralization. *Annals of Economics and Finance*, 14(February), 851–884. <http://ideas.repec.org/a/cuf/journal/y2013v14i3bahl.html>.
- Darwin Marasi Purba, Yansen Siahaan, R. A. F. (2020). *Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Dan Bukan Pajak Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bogor Tahun 2010 – 2017*. 6, 36–47. <https://financial.ac.id/index.php/financial>
- Ering, S., Budiman, D., & Juanda, B. (2017). *Analisis Potensi Pajak Daerah untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara An Analysis on North Sulawesi ' s Local Tax Potential to Strengthening Its Fiscal Capacity Pendahuluan*. 17(1), 75–87.

- Fios, F. (2012). Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer. *Humaniora*, 3(1), 299. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>.
- Intani, R. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1, 1–164.
- Kementrian Keuangan RI. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*. 1–25.
- Kurniasih; Yani Firdaus; Muhammad Hendrakusumaatmadja; Sutara. (2011). Strategi Meningkatkan Kapasitas Fiskal (Pajak Daerah) di Pemerintah Daerah Kota Bogor (Studi Kasus Dispenda Kota Bogor). *Scientific Repository*. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/53302>.
- Lisnawati, L. (2018). Pengaruh Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Kapasitas Fiskal Di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 4(2), 1249–1262.
- Prasetyo, R., & Ngumar, S. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 854–869. [file:///C:/..SKRIPSI/JURNAL/Rudi Prasetyo.pdf](file:///C:/..SKRIPSI/JURNAL/Rudi%20Prasetyo.pdf)
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sugiyono (ed.)). Alfabeta. <file:///C:/Users/User/OneDrive/Gambar/Sugiyono.pdf>
- Yuliana; Adi Wijaya; Mauliadi. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil pajak serta dana bagi hasil non pajak terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi kalimantan timur The effect of local revenue , tax revenue sharing funds and non tax revenue sharing funds on regiona. *Ekonomi Bisnis*, 23(1), 351–357.